

A B S T R A K

Rekonstruksi hukum Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Dalam Konteks Pendaftaran Fidusia Berbasis Keadilan.

O.K.Isnainul¹

H. Gunarto²

Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan kebutuhan semakin banyak dan semakin besar, maka biaya yang dibutuhkan pun akan semakin banyak, baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk usaha yang mana biaya yang diperlukan tersebut sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam. Dalam kegiatan pinjam meminjam tersebut terdapat produk hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Disinilah jaminan fidusia hadir untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penjaminan pada kegiatan pinjam-meminjam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi dari undang-undang jaminan fidusia No 42 Tahun 1999, Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu rekonstruksi hukum yang ideal terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 agar penegakan hukum dan kepatuhan hukum yang menjadi cita-cita dari Undang-undang ini dapat terwujud secara ideal dan optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yang meliputi azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Ada 2 Temuan penting dalam penelitian ini, **Pertama**, Adanya ketidaktegasan sanksi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sehingga hal ini menjadikan Undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan dalam Penerapan hukumnya. **Kedua**, Adanya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, sehingga penegakan hukum dari undang-undang ini tidak optimal sebagai Hukum Normatif dan undang-undang Jaminan Fidusia tidak memiliki upaya paksa dalam hal penegakan hukum untuk keharusan dalam melakukan pendaftaran fidusia. Dikarenakan kelemahan-kelemahan dari Undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 ini, peneliti melihat sangat diperlukan suatu Rekonstruksi yang ideal terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia agar penegakan hukum dan Kepatuhan Hukum dapat terwujud dengan ideal, Optimal dan memenuhi rasa Keadilan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Perjanjian, Pembiayaan, Fidusia.

¹ O.K.Isnainul, SH.MH, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

² Prof.Dr.H.Gunarto,SE.Akt.SH.MH, Promotor / Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRACT

Reconstruction of Guarantee law on Financing Agreement in the Context of Justice-Based Fiduciary Registration.

O.K.Isnainul¹
H. Gunarto²

Along with the increase in economic development and the need for more and more large, the costs needed will also increase, both for the needs of life and for businesses where the required costs are mostly obtained from lending and borrowing activities. In lending and borrowing activities, there are legal products that are used by the community in the form of goods guarantee to obtain financing. This is where the fiduciary guarantee is present to meet the legal requirements in guaranteeing lending and borrowing activities.

The purpose of this study was to determine the application of the fiduciary law No. 42 of 1999. The next objective of this research is to design an ideal legal reconstruction of the Fiduciary Security Law No. 42 of 1999 so that law enforcement and legal compliance which are the ideals of this Law can be realized in an ideal and optimal manner. This study uses Normative legal research which includes legal principles, legal systematics, legal synchronization, legal comparison and legal history.

There are 2 important findings in this study, *First*, the existence of irresponsible sanctions in the Fiduciary Guarantee Law, so that this law has no power in the application of the law. *Second*, the existence of synchronization and disharmony in the Fiduciary Guarantee Law and the Regulation of the Minister of Finance which is the implementing regulation, so that the law enforcement of this law is not optimal as the Normative Law and Fiduciary Guarantee law do not have a forced effort in terms of law enforcement for necessity in carrying out fiduciary registration. Due to the weaknesses of the Fiduciary Security Law No. 42 of 1999, researchers see that it is necessary for an ideal Reconstruction of the Fiduciary Guarantee Law so that law enforcement and Legal Compliance can be realized with an ideal, optimal and fulfilling sense of Justice.

Keywords: *Reconstruction, Agreement, Financing, Fiduciary.*

¹ O.K.Isnainul, SH.MH, Student at Doctor of Law Science Program (PDIH), Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Semarang.2018

² Prof.Dr.H.Gunarto,SE.Akt.SH.MH, Promoter / Lecturer at Doctor of Law Science Program (PDIH), Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Semarang.

